Analisis Wacana Kritis Perlawanan dalam Mural SeBumi

(Diskursus Perlawanan dalam Penolakan Pendirian Pabrik PT Semen Indonesia di Rembang)

NASKAH PUBLIKASI

Disarikan dari Skripsi yang Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Oleh

Sarah Rahma Agustin

NIM : 14321196

Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA

NIDN 0516087901

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

NASKAH PUBLIKASI

Analisis Wacana Kritis Perlawanan dalam Mural SeBumi

(Diskursus Perlawanan dalam Penolakan Pendirian Pabrik PT Semen Indonesia di Rembang)

Disusun oleh

Sarah Rahma Agustin

NIM : 14321196

Telah disahkan oleh dosen pembimbing skripsi pada : 13 DEC 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA

NIDN 0516087901

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA.

NIDN 0516087901

Analisis Wacana Kritis Perlawanan dalam Mural SeBumi

(Diskursus Perlawanan dalam Penolakan Pendirian Pabrik PT Semen Indonesia di Rembang)

Analisis Wacana Kritis Perlawanan Kebenaran dalam Mural SeBumi

(Diskursus Perlawanan Penolakan Pendirian Pabrik PT Semen Indonesia di Rembang)

Diajukan oleh

Sarah Rahma Agustin

14321196

Telah Disetujui:

Tanggal : 13 DEC 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA.

NIDN 0516087901

Analisis Wacana Kritis Pelawanan dalam Mural SeBumi

(Diskursus Perlawanan dalam Penolakan Pendirian Pabrik PT Semen Indonesia di Rembang)

Sarah Rahma Agustin *Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII, menyelesaikan studi pada tahun 2018*

Muzayin Nazaruddin

Staf pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi

Abstract :

Penelitian ini mengkaji tentang wacana penolakan pendirian PT Semen Indonesia di Rembang yang produksi oleh masyarakat.. Objek penelitian ini adalah mural yang berada di Posko Pembebasan Tolak Desa Tegaldowo, Kec. Gunem, Kab. Rembang, Jawa Tengah. Penelitian ini membahas bagaimana produksi pengetahuan tentang penolakan pendirian pabrik dan bagaimana relasi kuasa bekerja dalam konflik tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat banyak wacana yang diproduksi oleh masyarakat untuk menguatkan penolakan pendirian pabrik PT Semen Indonesia seperti kelestarian alam, menjaga lingkungan, ketersediaan air, polarisasi masyarakat, PT Semen Indonesia pembohong, pemerintah dan aparat bekerjasama, pelanggaran hokum serta relasi kuasa dan dominasi dalam konflik.

Kata Kunci: konflik lingkungan, wacana penolakan PT Semen Indonesia, mural.

Pendahuluan

Rencana berdirinya pabrik PT. Semen Indonesia yang berlokasi di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010an menuai pro kontra dari masyarakat sekitar. Beredarnya isu rencana pendirian pabrik santer terdengar di masyarakat Kabupaten Rembang tepatnya pada 2013 awal. Tanpa sepengetahuan

masyarakat, ternyata proses perizinan telah berjalan sejak tahun 2010 dengan dikeluarkannya Wilayah Izin Usaha Pertambangan oleh Bupati Rembang M. Salim bernomor 545/68/2010.[1]

Rencana pendirian pabrik menimbulkan polemik bagi warga sekitar. Gelombang penolakan terhadap berdirinya pabrik semen kian massif. Perjuangan masyarakat penolak semen mulai diketahui oleh publik sejak "Tenda Perjuangan" berdiri di jalan pintu masuk tapak pabrik PT. Semen Indonesia. Aksi pada 16 Juni 2014 merupakan bentuk perlawanan dan penolakan atas invasi pabrik semen yang mengancam ruang hidup petani dan ketersediaan air. Kemudian, perjuangan litigasi melauli jalur hukum juga dilakukan warga penolak pabrik semen bertujuan untuk mencabut izin lingkungan yang dikeluarkan atas nama PT. Semen Indonesia oleh Gubernur Jawa Tengah. Upaya jalur hukum dimulai dari gugatan warga Rembang kepada PT. Semen Indonesia melalui PTUN Semarang dengan Nomor: 064/G/2014/PTUN.SMG tanggal 16 April 2015. Gugatan yang diajukan warga ditolak oleh PTUN dengan alasan kadaluarsa.

Tidak berhenti disitu,warga kembali melakukan upaya banding melaului PTUN Surabaya. Uapaya tersebut menghasilkan putusan bernomor : 135/B/2015/PT.TUN.SBY tertanggal 3 November 2015 dengan putusan warga penggugat kembali dikalahkan. Selanjutnya, warga mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada 5 Oktober 2016 dengan No. Register 99 PK/TUN/2016 atas kasus PT. Semen Indonesia di Rembang. Peninjauan Kembali dimenangkan oleh warga. Dengan demikian Mahkamah Agung mengabulkan permohonan warga Rembang atas pembatalan izin lingkungan PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.[2]

Di sisi lain, masyarakat yang mendukung berdirinya pabrik semen PT. Semen Indonesia meyakini, dengan berdirinya pabrik akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal yang sama sering kali dijadikan pembenar oleh PT. Semen Indonesia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Rembang Abdul

---

[1]A.B. Rodhial Falah dan Cahyo Rahmadi, "Telaah Semen Rembang : Antara Ramah Lingkungan Dan Kenyataan Sebenarnya" http://www.mongabay.co.id/2015/04/27/telaah-semen-rembang-antara-ramah-lingkungan-dan-kenyataan-sebenarnya/, (diakses pada tanggal 3 April 2017 pukul 21.32 WIB).

[2] Taufan, "Perjuangan Warga Rembang Menolak Pembangunan Pabrik Semen," https://semarak.news/2016/12/06/11108-perjuangan-warga-rembang-menolak-pembangunan-pabrik-semen-rembang.html (diakses pada 3 April 2017 pukul 22.30).

Hafidz, Camat Gunem Teguh Gunawarman hingga Kepala Desa Tegaldowo Suntono, yakni berdirinya pabrik semen akan meningkatkatkan PAD, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan dampak (positif) ekonomi bagi warga sekitar.[3] Selain hal tersebut alasan lain yang diutarakan masyarakat pro ialah bahwa PT. Semen Indonesia merupakan perusahaan di bawah BUMN dengan total saham negara 51%, maka jika pabrik semen tidak beroperasi negara akan mendapatkan kerugian.

Konflik pendirian PT Semen Indonesia juga memicu polarisasi masyarakat yang semakin tampak dan kompleks. Hal ini dapat dilihat dengan beberapa kali aksi menyuarakan aspirasi bersamaan antara masyarakat penolak dan masyarakat yang setuju dengan adanya pabrik. Selain itu pertarungan wacana yang ada antar masyarakat penolak dan pendukung pabrik semen memiliki legitimasi masing-masing. Masyarakat penolak semen menyangsikan Amdal PT. Semen Indonesia yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2010-2030 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tantang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 bahwa cekungan air tanah CAT Watuputih bagian dari kawasan lindung geologi. Terlepas dari hal tersebut, berdirinya PT. Semen Indonesia di Rembang telah pendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang ataupun Gubernur Jawa Tengah.[4]

Penelitian ini akan melihat bagaimana teks-teks yang diproduksi oleh masyarakat yang menolak pendirian pabrik semen PT. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng Utara Rembang Jawa Tengah sebagai strategi wacana untuk menyampaikan kebenaran. Hal tersebut menarik untuk diteliti karena sebagian masyarakat memiliki tingkat literasi politik yang tinggi. Selain itu, pada ranah akademis, penilitian yang mengkaji tentang teks-teks lokal yang diproduksi oleh masyarakat masih sangat jarang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ialah analisi wacana kritis Foucaultdian.

Tinjauan Pustaka

1. Wacana, Pengetahuan , Kuasa dan Resistensi.

Menurut Michel Foucault, wacana merupakan sistem pengetahuan yang memberi informasi tentang teknologi sosial dan teknologi memerintah yang merupakan bentuk

---

[3]Dwicipta, Hendra Try Ardianto, *Rembang Melawan*, (Yogyakarta : Literasipress, 2015), Hal. 111.
[4]Dwicipta, Hendra Try Ardianto, *Ibid.*, hal.30.

kekuasaan dalam masyarakat modern. Pada pengertian ini, wacana dapat dilihat sebagai bahasa dalam praktik sosial atau bahasa menjadi peristiwa sosial, sehingga bahasa digunakan sebagai cara merepresentasikan pengetahuan.[5] Wacana tidak dapat dipahami sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks namun wacana adalah sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep atau efek).[6]

Bagi Foucault, istilah "*discourse"* merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan. Setelah beberapa waktu, Foucault kemabli merenungkan gagasan tentang diskursus dan menemukan trem sentral dengan sebutan *enonce* (statmen).[7] Menurut Foucault statmen bukanlah ungkapan (*utterance*) atau proposisi, bukan juga entitas psikologis atau logis, juga bukan bentuk ideal atau event.[8]

Bagi Foucault, guna menyelidiki kumpulan-kumpulan pernyataan tersebut dapat digunakan tiga konsep yang saling berkaitan yakni positivitas, apriori historis dan arsip. Positivitas diskursus digunakan untuk melihat keterikatan satu diskursus dengan diskursus yang lain dalam periode tertentu. Lebih jelasnya, sekelompok ilmuan yang dipengaruhi oleh pemikiran yang sama disitulah terjadi positivitas. Kemudian positivitas tersebut mungkin terjadi dan membentuk sebuah sistem pemikiran apabila terdapat apriori historis, yakni adanya syarat atau atruan yang menentukan perwujudan diskursus itu sendiri. Akhirnya setelah melalui positivitas dan apriori historis, terbentuklah sebuah sistem pembentukan pernyataan-pernyataan dan transformasi atau yang Foucault sebut dengan arsip. Sehingga arsip bukanlah sesuatu yang pasif yang berisi dokumen masa lampau melainkan dapat menimbulkan pernyataan-pernyataan baru.[9]

Selain itu, "sistem pemikiran" yang ada pada masa tertentu dan menjelaskan bagaimana cara mempraktikkan ilmu pengetahuan disebut Foucault dengan *episteme. Episteme* tidak secara jelas terlihat, melainkan bersifat eksplisit. Guna menyelidiki epistem pada suatu periode tertentu, manusia harus menggali melalui arsip-arsip tertentu. Upaya demikian disebut Foucault dengan arkeologi pengetahuan.

---

[5] Hariyatmoko, "Critical Discourse Analysis", (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). Hal 3.
[6] Eriyanto, "Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media", (Yogyakarta:Lkis,2001). Hal 65.
[7] Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow, *Beyond Structuralism And Hermeneutic*, (Chicago : University Of Chicago Prees, 1982), Hal 48.
[8] Listiyono Santooso, *et al., Epistinologi kiri*, (Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2014). Hal 171.
Satatmen bukan suatu proposisi karea kaliat sama dengan arti yang sama akan menjadi suatu statmen yang berbeda , yakni memiliki kondisi kebenaran yang berbeda tergantung kumpulan statmen statmen yang lain saat statmen tersebut muncul. Statmen bukanlah ungkapan, karena beberapa ungkapan yang brbeda dapat menjadi suatu ulangan statmen yang sama.
[9]K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX, Jilid II (Prancis)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1985). Hal. 482.

Kemudian, guna mengetahui arkeologi, seseorang dapat menggunakan empat prinsip yang mendasar. Pertama, terdapat dua kategori diskursus dalam sejarah pemikiran yakni diskursus yang baru dengan lama, tradisional dan original, biasa dan luar biasa. Artinya arkeologi memiliki cara untuk melihat temuan-temuan baru, mempertontonkan keterkaitan antara satu temuan dengan penemuan lainnya. Kemudian, keseluruhan dari peranan dan keterkaitan anatar diskursus yang menjamin dan menentukan terjadinya diskursus disebut dengan *the regularity (regularite) of discursive practise* oleh Foucault. Kedua, adanya dua macam kontradiksi untuk mengenal sejarah pemikiran yakni kontradiksi yang nampak di permukaan dan kontradiksi yang menyangkut fenomena diskursus lainnya. Kontradiksi tersebut tidak perlu untuk ditelanjangi dan harus dilukiskan sebagaimana yang terlihat. Ketiga, arkeologi membandingkan antara satu praktik diskursus dengan praktik lainnya. Bagi Foucault arkeologi tidak menyelidiki sebab bagaimana konsep atas diskursus, melainkan hanya menemukan jangkauan dan berfungsinya suatu diskursus. Keempat, perubahan dalam suatu diskursus dapat dilukiskan dengan pendekatan analisis arkeologis. Perubahan tersebut bukan sebuah penemuan baru melainkan perubahan atas berbagai macam transformasi sehinga sangat memungkikan terjadinya diskontinuitas walaupun bukan tujuan atas dirinya. Artinya arkeologi memberikan sebuah ruang atas perubahan suatu diskursus jika muncul diskursus baru dan juga bisa saja terjadi beberapa unsur masih tinggal dalam diskursus lama.[10]

Menurut Foucault, statmen adalah "serious speech-act". Secara bebas bisa kita artikan dengan penggunaan ungkapan bermakna sebagai suatu tipe tindakan yang mempunyai konsekuensi sosial yang serius karena telah disusun dengan validasi yang pasti, dalam komunitas para ahli dan lainnya. Perbincangan seorang pelajar yang yang mengatakan "Pegunungan Kendeng Utara tidak boleh ditambang karena termasuk dalam kawasan lindung geologi" hanya akan menjadi aktus perbincangan sehari-hari (everyday speech-acts). Namun pernyataan ini akan menjadi "serious speech-act" jika dolontarkan oleh menteri lingkungan hidup berdasarkan hasil dari kajian lingkungan hidup strategis. Menurut Foucault ini merupakan manifestasi dari *the will of truth.*

Menurut Faucoult, dalam wacana terdapat hubungan pengetahuan, kekuasaan dan kebenaran. Kuasa menurut Faucoult tidak dimiliki tapi dipraktikkan dalam ruang lingkup dimana ada posisi strategis yang saling berkaitan, disitulah kuasa sedang bekerja.[11]

---

[10]K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX, Jilid II (Prancis)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1985). Hal. 485.
[11] Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta:Lkis, 2001), Hal 66.

Penyelenggara kekuasaan menurut Foucault akan selalau memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Hampir tidak mungkin kekuasaan tanpa ditopang oleh suatu ekonomi politik kebenaran.[12] Kuasa memproduksi pengetahun dan bukan saja pengetahuan berguna bagi kuasa, tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan tidak ada kuasa tanpa ditopang pengetahuan.[13] Disinilah terdapat korelasi, pengetahuan mengandung kuasa, dan kuasa mengandung mengetahuan. Mustahil pengetahuan itu netral atau murni, pengetahuan selalu bersifat politis.[14]

Wacana akan menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu. Bagi Foucault, pengetahuan bukanlah sesuatu yang bebas nilai atau netral melainkan mengandung dan menimbulkan efek kuasa, sehingga menurut Foucault, pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Setiap kekuasaan akan memproduksi dan memberikan narasi kebenaran sendiri melalui mana khalayak diarahkan untuk mengimani kebenaran yang telah ditetapkan tersebut.[15]Sehingga setiap kekuasaan akan menarasikan rezim kebenaran tertentu sesuai denagn narasi wacana yang dibentuk. Tentunya ada beragam aturan dan prosedur untuk mendapatkan dan menyebarkan kebenaran.[16]Selain itu, kuasa bekerja bukanlah sesuatu yang menindas dan represi, melainkan kuasa bekerja melaui normalisasi dan regulasi serta bekerja dengan cara positif dan produktif.

Dalam analisis Foucault, kekuasaan tidak hanya melahirkan kepatuhan, melainkan melahirkan resistensi. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (resistance). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.[17] Semakin kuat kekuasaan melancarkan strateginya melaui cara represif ataupun normalisasi dan regulatif, niscaya semakin besar peluang terjadinya resistensi. Resistesi adalah anak kandung dari kekuasaan.[18] Resistensi

---

[12] George Junus Aditjondro, *Pengetahuan-Pengetahuan Lokal yang Tertindas*, *Jurnal Kebudayaan Kalam*. Vol. 1, (1994), Hal 58.
[13]K. Bertens, *Op.Cit*,. Hal. 487.
[14]K. Bartens, *Ibid*. Hal 488.
[15] Eriyanto, *Critical Discourse Analysis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hal 58
[16] K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX, Jilid II (Prancis)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1985), Hal 487.
[17] Umar Kamahi, Teori Kekuasaan Michel Foucault : tantangan Sosiologi Politik. Jurnal Al-Khitobah, Volume 3, (Juni 2017), hal. 117-133.
[18] Muh Taufik dan M Arif Afandi, Resistensi Gerakan Mahasiswa terhadap Kapitalisme Pendidikan. Jurnal Paradigma, Volume 2, (2014). Hal 1-13.

menjadi salah satu bentuk teknologi politis atas kekuasaan, sehingga resistensi menajdi sesuatu yang inheren dan tak bisa dilepaskan dari adanya kekuasaan itu sendiri.[19]

Dimana ada kuasa, selalu ada resistensi. Namun, resistensi ini tidak pernah ada dalam posisi eksterior dalam hubungan dengan kuasa. Dalam relasi-relasi kuasa menurut Foucault, yang dianggap sebagai penindas dapat bertemu dengan korban. Setiap tindakan seseorang dapat langsung ditanggapi dengan reaksi orang lain, tetapi selalu dalam nuansa kebebasan dan saling menerima. Kuasa ada dalam aksi dan dapat dipraktikkan oleh seorang terhadap aksi atau tindakan orang lain. Resistensi harus dimengerti dalam arti ini.[20]

James Scott menerjemahkan kekuasaan Foucault sebagai sesuatu yang menyebar tidak hanya berbentuk otoritas semata. Dalam konflik, perlawanan tidak harus secara frontal dengan mempertemukan dua kekuatan secara langsung, namun perlawanan bisa dilakukan dengan berbagai cara baik secara simbolik ataupun menghindar oleh siapa saja. Konflik yang berjalan secara tidak langsung dengan perlawanan yang halus menjadikan resistensi semakin kultural. Foucalut, melihat kekuasaan sebagai seluruh struktur yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, persuasi atau juga melalui paksaan dan larangan. Kekuasaan tidak datang dari atas ke bawah, tetapi menyebar di mana-mana baik pada individu, organisasi atau institusi. Oleh karena itu, penyebaran kekuasaan tersebutlah memberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan resistensi dengan strategi yang dibangun pada konteks dimana ia berada.[21]

Anwar Holif mengindentifikasi resistensi Faucoult memiliki semangat yang sesuai dengan konteks dan ciri yang beragam. Resistensi bisa berupa wujud dua gerakan strategis yang kontradiktif, yaitu melakukan pemberontakan sedangkan yang lain malah mengisolasi diri. Karena manusia sebagai subjek kekuasaan, maka setiap manusia akan melakukan resistensi terhadap kekuasaan lain, tidak mesti berhadapan langsung. Hal ini disebabkan gejala resistensi tidak melihat kekuasaan hanya bersifat otoritas dari atas ke bawah, tetapi kekuasaan ada pada setiap orang, tinggal bagaimana mengotimalkan kekuasaan tersebut untuk diri.

Menurut Scott terdapat beberapa bentuk resistensi yaitu:

---

[19] Nanda Heraini, Makna Nilai Resistensi Dalam Kebudayaan Hip Hop (Analisis Studi Resepsi Anggota Kelompok Tari Hip Hop Monkiez Terhadap Konsep Resistensi), (Tesis Magister, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2012). Hal. 39.

[20] Konrad Kebung, Membaca Kuasa Michel Foucault dalam Konteks Kekuasaan di Indonesia, Jurnal Melintas Volume 33 (2017), hal. 34-51.

[21] Suriadi 2012

a. Resistensi tertutup (simbolis atau ideologis) yaitu gossip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.
b. Resistensi semi-terbuka (protes sosial atau demostrasi)
c. Resistensi terbuka, merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi adalah cara-cara kekerasan (violent) seperti menampar, menimpuk, meludahi, melempar, membentak, memaki, menghina, meneriaki, mengucilkan, memelototi, mencibir, dan memandang penuh ancaman.

2. Analisis Wacana Kritis sebagai Pendekatan untuk Membongkar Praktik Kuasa.

Metode analisis wacana kritis[22] merupakan metode baru yang dipakai dalam penelitian disiplin ilmu sosial dan budaya. Dalam analisis wacana kritis terdapat tiga prostulat yakni semua pendekatan yang dipilih harus beroririentasi pada problematika sosial, sehingga menuntut pendekatan lintas keilmuan. Kedua, analisis wacana kritis bermaksud untuk mendemistifikasi ideologi dan kekuasaan melalui penelitian sistematik. Ketiga, analisis wacana kritis selalu bersifat reflektif, yakni penelitimengambil jarak dengan objek yang diteliti guna memeriksa nilai dan ideologi.

Analisis wacana kritis akan melihat bagaimana praktik wacana digunakan untuk mengkontruksi masalah-masalah sosial yang ada. Selain itu metode ini juga dapat digunakan untuk meneliti ideologi yang terkandung dalam bahasa sehingga dapat membongkar ideologi yang mengikat didalamnya serta memiliki kepekaan terhadap bentuk ketidakadilan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, analisis wacana kritis dapat menunjukkan pemaknaan bahasa dalam hubungan kekuasaan dan hubungan sosial, sehingga peneliti harus mengerti bagaimana makna diciptakan didalam konteks sosial politik tertentu, meneliti peran dari tujuan pembicara atau pengarang atau penulis didalam kontruksi wacana tersebut. Untuk lebih mudah menganalisis menggunakan analisis wacana kritis terdapat enam prinsip dasar yakni teks dan konteks, keberurutan dan intertekstualitas, konstruksi dan strategi, peran kognisi sosial, aturan penggunaan kategori penganalisis, interdiskursivitas.[23]

Berdasarkan pemikirian Foucauldian prinsip analisis wacana kritis sebagai berikut :

---

[22] Hariyatmoko, "Critical Discourse Analysis", (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). Hal 8.
Simposium yang diselenggarakan di Amsterdam pada Januari 1991 yang dihadiri oleh R. Wodak, T. van Dijk, N Fairclough, G. Krees, T. van Leeuwen dianngap meresmikan AWK. Meeka mendiskusikan kesamaan dan perbedaan teori dan metode masing-masing untuk menjadi titik tolak pengembangan AWK.
[23] Hariyatmoko. *Critical Discourse Analysis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal.

1. Selalu berhubungan dengan masalah sosial. Pendekatan ini tidak berkaitan dengan bahasa maupun penggunaan bahasa secara eksklusif, namun dengan sifat linguistik dari struktur dan proses-proses sosial dan kultural.

2. Relasi kekuasaan selalu berhubungan dengan wacana.

3. Budaya dan masyarakat secara dialektis berhubungan dengan wacana: masyarakat dan budaya dibentuk oleh wacana dan sekaligus menyusun wacana.

4. Penggunaan bahasa selalu bersifat ideologis.

5. Wacana bersifat historis dan hanya bisa dimengerti dengan memahami konteksnya.

6. Hubungan antara teks dan masyarakat itu bersifat tidak langsung, namun termanifestasi melalu perantara seperti model sosio-kognitif.

7. Analisis wacana bersifat interpretif dan eksplanatoris. Interpretasi senantiasa selalu terbuka bagi konteks dan informasi baru.

8. Wacana merupakan bentuk perilaku social.[24]

3. Metodologi Visual

Budayamerupakan proses produksi dan pertukaran makna dalam praktik kehidupan sehar-hari. Hari ini visualitas menjadi bagian dari pusat kehidupan sosial tersebut. Budaya visual tidak hanya sebuah ilustrasi melainkan dapat mengonstruksi dan menampakkan perbedaan sosial. Selain itu dalam budaya visual tidak hanya memperhatikan bagaimana gambar itu tampak, namun juga memperhatikan bagaimana gambar tersebut dilihat oleh audiens tertentu.[25]

Dari kajian Foucault (terutama merujuk pada kajiannya atas lukisan Diego Velasques ―Las Maninas") terdapat langkah-langkah metodologis dalam menganalisis wacana visual diantaranya: Siapa pusat kuasa yang berada dalam sebuah wacana visual? Siapa subjek yang diposisikan dalam wacana tersebut? Apakah subjek tersebut yang berkuasa atau subjek yang lain? Apa pengetahuan yang diproduksi dalam wacana tersebut? Bagaimana relasi kuasa dalam gambar, misalnya, relasi spasial? Bagaimana pola tatapan antara orang dalam gambar?[26]

---

[24] Stefan Titscher, *et al., Metode Analisis Teks dan Wacana*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2009), hal. 238.
[25]Rachma Ida, *Metode Penelitian Studi Media Dan Kajian Budaya*, (Jakarta: Pranada Media Group), hal. 128.
[26] Kamil Alfi Arifin. "Wacana Keistimewaan dan Politik Ruang". (Skripsi sarjana Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islma Indonesia 2011), hal. 108.

Selain itu, Gillian Rose mengemukakan prinsip-prinsip penting yang dapat dilakukan dalam menganalisis teks diantaranya melihat pengorganisiran sebuah retorika dalam wacana dan produksi sosial wacana tersebut. Rose juga menjelaskan cara kerja dalam menganalisis materi visual diantaranya memperhatikan objek visual secara detail dan mengesampingkan asumsi yang muncul dari setiap peneliti, identifikasi tema kunci dalam objek visual, menjelaskan strategi pembenaran dan efek yang dihasilkan dalam objek visual, memahami kontradiksi-kontradiksi dalam teks yang akan dikaji, melihat posisi subjek, baik yang terlihat (visible) maupun yang tidak terlihat (invisible), kemudian menjelaskan produsen dan lokasi teks, waktu dan tempat serta audiens yang dituju (produksi sosial objek).[27]

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat elemen-elemen penting dalam melihat mural yang didasarkan atas metodologi visual Gillian Rose dan Foucaultdian yakni tema utama -tema pokok dari objek visual mural yang diproduksi oleh Sebumi yang berlokasi di balai pembebasan dan beberap titik di Desa Timbrangan-, pengetahuan (ide/gagasan) yang diproduksi dalam mural, strategi pembenaran (legitimasi)dan efek yang dihasilkan, kontradiksi-kontradiksi dalam teks, subjek yang diposisikan dalam mural (visible dan invisible) dan kuasa (produsen; lokasi teks; audiens yang dituju).

Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Pada penelitian kali ini, untuk mengungkap secara holistik dengan memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi dari teks yang ditelit,i maka paradigma yang digunakan ialah paradigma kritis. Paradigm kritis akan menekankan pada tanggungjawab peneliti untuk mengubah ketidakadilan dalam kondisi *status quo.*[28]Paradigma kritis merupakan pendekatan yang melihat ilmu sosial sebagai suatu proses yang secara kritis mengungkap struktur yang sebenarnya dalam membentuk kesadaran sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia.[29]

Selain itu menurut Dezin dan Lincoln, terdapat tiga hal dalam menilai sebuah paradigma, yaitu ontologi, epistemologi dan metodologi. Ontologi digunakan untuk melihat asumsi mengenai objek yang diteliti. Paradigma kritis akan melihat objek penelitian dengan

---

[27] Gillian Rose, *Visual Methodologies: An Introduction to The Interpretation of Visual Materials*, (London: SAGE Publication, 2007), hal. 165-166.
[28] Rechard West, Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Praktik*, (Jakarta: Salemba humanika, 2014). Hal. 76.
[29] Norman K Dezin dan Yvonna S Lincoln, *"Handbook of Qualitative Research"*, (London: Sage Publication), Hal. 199.

cara realisme historis. Hal ini diperlukan mengingat realisme virtual yang dibentuk oleh kekuatan sosial, ekonomi, politik, nilai gender, etik yang sudah terkristalisasi dalam waktu yang lama. Dari sisi epistimologi, paradigma kritis melihat hubungan antara peneliti dan objek bersifat subjektif atau transaksional, yaitu terdapat nilai yang mengantarai temuan sebuah penelitian. Dari segi metodologis, asumsi mengenai cara memperoleh pengetahuan tentang objek suatu pengetahuan sifatya dialogis atau dialektis.[30]

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis yang menekankan pada kontruksi makna. Penelitiani ini juga akan menganilis hubungan dengan unsur lain peristiwa sosial (praktik sosial dan struktur sosial) serta intertekstualitas.Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis konteks, wawancara dan pengamatan partisipatoris.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uraian hasil analisis di atas menunjukkan kompleksitas pengetahuan, relasi kuasa dan strategi wacana dalam konflik penolakan pendirian PT Semen Indonesia di CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Utara, Rembang. Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan secara singkat temuan-temuan dari hasil analisis mural yang diproduksi oleh SeBumi bersama masyarakat tolak sebagai berikut :

A. Produksi Wacana Tentang Perjuangan Masyarakat Menolak Pabrik Semen PT Semen Indonesia.

Perlawanan masyarakat penolak pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia tak lagi diragukan. Perlawanan tersebut telah bertahun-tahun yang termanifestasi dalam sebuah gerakan baik melalui gerakan litigasi atau pun non litigasi. Dalam melakukan perlawanan, masyarakat rela mengorbankan tenaga, fisik, materi hingga nyawa. Hal ini dilatarbelakangi atas ketidakrelaan masyarakat jika tanahnya ditambang karena akan mengancam ruang hidup manusia. Sehingga masyarakat memiliki satu tekad untuk melindungi ruang hidup tersebut dari ancaman pengerusak alam yakni PT Semen Indonesia beserta kroni-kroninya. Berikut sistem pengetahuan dan pembenaran yang melatarbelakangi gerakan penolakan perdirinya PT Semen Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat.

---

[30] Nina widyawati, *Etnisitas Dan Agma Sebagai Isu Politik Kampanye JK-WIRANTO pada pemilu 2009*, (Jakarta : Yayasan pustaka obor Indonesia, 2014), Hal. 31.

1. Pengetahuan Modern Gerakan Penolakan Pendirian PT Semen Indonesia Di Rembang.

Kegigihan masyarakat dalam memperjuang kelestarian Pegunungan Kendeng Utara tercermin dalam pengetahun yang dimiliki. Melalui berbagai relasi yang dimiliki, masyarakat mengetahui secara holistik apa yang ada di pegunungan tersebut, salah satunya ialah pengetahuan modern.

CAT Watuputih merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng Utara ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang tahun 2011-2031 dan sebagai kawasan imbuhan air berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2010-2030. Produk hukum tersebut semakin meyakinkan masyarakat bahwa tidak semestinya PT Semen Indonesia berada di Rembang.

2. Kearifan Lokal Dibalik Gerakan Penolakan Pendirian PT Semen Indonesia Di Rembang.

Pegunungan kapur yang membujur dan mencakup sebagian dari Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan dan Blora (Jawa Tengah), serta di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan (Provinsi Jawa Timur) dinamai warga sebagai Pegunungan Kendeng Utara. Terdapat metafora yang hidup di masyarakat tentang pegunungan tersebut sebagai "Seekor Naga yang sedang tidur". Bahwa Pegunungan Kendeng Utara merupakan satu kesatuan makhluk hidup yang harus disantuni, dihormati dan tidak boleh disakiti. Jika alam terusik karena ulah manusia, bukan tidak mungkin alam bisa marah dan mengamuk, seperti seekor naga yang marah karena terusik dari tidurnya. Metafora tersebut termanifestasikan dalam sebuah tembang jawa yang berjudul Ibu Bumi (*Ibu bumi wis maringi Ibu bumi dilarani Ibu bumi kang ngadili La ilaha illallah Almalikul haqqul mubi Muhammadan rasulullah Shadiqul wa'dil amin)* sebagai pujian terhadap alam dan digunakan dalam setiap aksi sekaligus sebagai ruh gerakan penyelamatan Pegunungan Kendeng Utara.

Selain itu secara antropolis bagi masyarakat di sekitar Kendeng bertani merupakan jatidiri. Sosio kultural pertanian tidak bisa tergantikan oleh materi, alam bukan untuk dieksploitasi dan sawah sebagai proses kebudayaan dan hasil warisan sejarah. Kesejahteraan masyarakat bukanlah akumulasi dalam konteks kapitalisme melainkan kekayaan batin dan kemandirian yang dianut dari leluhur. Hukum alam dan

pengetahuan lokal di masyarakat Kendeng meyakini bahwa manusia dan alam memiliki filosofi hubungan hakiki dengan prinsip "Tanah hilang, kami pun punah". Maka mencerabut masyarakat dari ruang hidup (tanah) sama halanya meniadakan keberadaannya.

Sejarah telah mencatat tepatnya abad ke 14, daerah di sekitar Pegunungan Kendeng Utara seperti Demak, Pati, Rembang, Lasem, Gresik, Surabaya sebagai tempat penyebaran Islam oleh para wali. Para wali merengkuh ajaran Islam dengan di-Jawa-kan dan menjadi milik orang Jawa itu sendiri atau disebut sebagai Islam-Jawa. Islam Jawa mempraktikkan ritual tentang siklus kehidupan yang biasa disebut sebagai selametan. Sebuah perayaan atas keselamat yang diberikan Tuhan dan kehidupan yang baik sesama manusia dengan manusia. Selain itu, perayaan ucapan terimakasih kepada alam yang telah memberi kehidupan dan keselamatan sering disebut masyarakat sekitar dengan Sedekah Bumi atau Brokohan.

Sejarah lain yang mengisahkan tentang Kendeng ialah adanya gerakan ratu adil yang erat kaitannya dengan tanam paksa tepatnya abad ke 19 ketika Belanda menetapkan pajak. Tokoh yang menonjol di Pegunungan Kendeng Utara adalah Samin Surosentiko dengan menolak pembayaran pajak dan melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Hal tersebut yang berdampak signifikan hingga pemerintah kolonial harus turun tangan untuk membrangus grerakan ini.

Berbagai dimensi sejarah dan pengetahuan lokal tersebut membentuk diri masyarakat melalui proses peradaban yang panjang. Proses peradaban tersebut pada akhirnya diejawantahkan masyarakat dalam setiap gerakan tolak yakni dengan kesederhanaan yang syarat akan jatidiri masyarakat. Sehingga bagi masyarakat yang bermata pencaharian petani keberadaan PT Semen Indonesia di Rembang tidak berfaedah baginya.

Guna membenarkan narasi tersebut SeBumi, dan masyarakat selaku produsen teks menggunakan frasa sebagai strategi pembenaran untuk menguatkan dan menjelaskan perlawanan yang dilakukan warga seperti "tumpah darah, jangan rebut, mboten tiyang bodho".

3. Demi Anak Cucu Masyarakat Melawan Berdirinya Pabrik Semen.

Sebagai tempat bersandar hidup, bukan tidak mungkin Pegunungan Kendeng akan rusak beserta kekayaan alam yang telah memberikan kehidupan manusia jika

ditambang. Maka menjaga kelestarian kendeng sama halnya dengan menjamin keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang yakni masa depan anak cucu.

Sumber daya alam yang tersimpan di Pegunungan Kendeng Utara dimanfaatkan masyarakat untuk bertahan hidup. Misalnya mata air yang dimanfaatkan oleh warga di 14 kecamatan dan 40% dimanfaatkan oleh PDAM Rembang. Pemerintah harus berfikir jika hendak memberikan izin terhadap industri ataupun pemodal yang menginginkan sumber daya alam di Pegunungan Kendeng Utara, harta bagi ribuan jiwa manusia yang menyandarkan hidup di pegunungan tersebut. Maka kesejahteraan rakyat adalah harga mati diatas segalanya yang harus dibayar termasuk kepentingan para pemodal yang bertujuan melebarkan pangsa pasar.

Dalam mengukuhkan pengetahuan tersebut, strategi pembenaran yang digunakan oleh produsen mural ialah pemilihan frasa seperti tumpah darah, jangan rebut, *mboten tiyang bodho*, demi anak cucu, masa depan, kendeng milik rakyat, kendeng lestari, harta untuk rakyat, penggunaan frasa yang menjelaskan bahwa perlawanan dilakukan warga tidak lain demi anak cucu, masa depan, kendeng milik rakyat, kendeng lestari, harta untuk rakyat, tanah untuk petani.

4. Masyarakat Tolak : Penerus Perjuangan RA Kartini dan Soekarno

Penggalan pidato Ir. Soekarno "Revolusi belum selesai" dimaknai bahwa menuju kesejahteraan sosial memiliki berbagai tahap diantaranya adalah revolusi nasional dan revolusi sosial. Gerakan penolakan pendirian PT Semen Indonesia tidak lain adalah sebagai upaya menuju revolusi baik nasional ataupun sosial yang dikendaki oleh Soekarno.

Sosok Kartini jelas terlihat dalam mural yang berada di Posko Pembebasan. Semangat juang Kartini hidup di masyarakat. Jika Kartini dahulu berjuang melawan feodalisme melalui gagasan dan tulisan, lain halnya dengan perempuan yang berjuang melawan pengrusak Pegunungan Kendeng Utara. Keduanya bertujuan untuk membebaskan masyarkat. Hal ini yang kemudian membentuk narasi bahwa perumpuan-perempuan yang menolak berdirinya PT Semen Indonesia di Rembang dijuluki sebagai Kartini Baru atau Kartini Rembang.

Kehadiran sosok RA Kartini dan Soekarno tidak lain digunakan sebagai pembenaran bahwa yang diperjuangkan masyarakat ialah meneruskan apa yang telah

diperjuangkan RA Kartini dan Soekarno untuk melawan penindasan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

5. Rembang Daerah Agraris

Dua per tiga dari masyarakat Rembang jenis rumah tangganya ialah pertanian. Pegunungan Kendeng Uatar sebagai kawasan penyumbang air terbesar tentu sangat vital bagi kehidupan masyarkat Rembang. Selain itu, sosio kultural pertanian selama bertahun-tahun telah membentuk masyarakat dengan segala proses peradaban yang tercipta. Maka tanah sebagai media untuk bertani tentu sangat penting bagi masyarakat Rembang. Sebagai daerah agraris, masyarakat bisa hidup tanpa semen karena semen bukanlah kebutuhan utama. Berbeda dengan tanah yang sebagian hidup masyarakat bertumpu pada tanah.

Tanah sebagai kebutuhan bagi masyarakat Rembang termanifestasi dalam mural yang menggunakan *common sense*, kebenaran yang diyakini oleh semua orang, sebagai strategi pembenaran diantaranya petani lumbung pangan negeri ini, setiap orang butuh tanah, kami bisa hidup tanpa semen.

B. Produksi Pengetahuan tentang PT Semen Indonesia.`

1. Rencana Berdirinya Pabrik Memicu Terjadinya Polarisasi Masyarakat.

Perbedaan sikap atas pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang terlihat dalam interaksi sosial masyarakat. Labeling “Masyarakat Pro” dan “Masyarakat Tolak” sangat kental di masyarakat. Masyarakat pro meyakini bahwa kehadiran PT Semen Indonesiaa akan memberikan dampak peningkatan ekonomi melalui terbukanya lapangan pekerjaan. Sedangkan, masyarakat tolak bersikukuh menolak pendirian PT Semen Indonesia guna menyelamatkan ruang hidup manusia. Kedua sikap tersebut hadir dalam simbol simbol di sekitar Ring 1. Narasi perlawanan melalui berbagai medium baik pamflet, stiker atau tulisan di tembok-tembok. Hal tersebut mudah ditemukan di rumah masyarakat yang menolak semen sedangkan masyarakat pro biasanya akan memasang baliho ataupun logo PT Semen Indonesia di depan rumah.

Keberadan PT Semen Indonesia yang memicu polarisasi masyarakat diekspresikan dalam sebuah parodi -ungkapan lelucon yang meniru gaya seseorang sekaligus kritis-. Parodi "habis terang terbitlah gelap" merupakan plesetan dari judul buku RA Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang ini digunakan untuk menggambarkan Rembang sebelum dan sesudah adanya PT Semen Indonesia.

2. Bagi Masyarakat PT Semen Indonesia Pembohong.

Kebohongan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia sejak awal sudah tercium ketika proses jual beli tanah. Bahwa tanah yang sudah dijual oleh masyarakat akan dibuat penghijauan dan perkebunan jarak. Selain itu, terdapat ketidakterbukaan informasi tentang rencana pendirian pabrik semen di masyarakat. Sosialisasi rencana tersebut hanya dihadiri oleh segelintir elit desa beserta keluarganya tanpa melibatkan masyarakat lain. Kebohongan lain ialah retorika tentang kesejahteraan yang digaungkan oleh PT Semen Indonesia. Kesejahteraan tersebut hanyalah omong kosong karena dalam profil sosilogis salah satu desa di Ring 1 yakni Desa Tegaldowo pada tahun 2012 menunjukkan 4.990 bekerja di bidang pertanian dan 4.056 tingkat pendidikannya rata-rata Sekolah Dasar. Profil tersebut tentu tak sesuai dengan kriteria pekerja yang dibutuhkan oleh PT Semen Indonesia. Selain itu, jumlah ponor dan mata air yang tertuang di ANDAL berbeda dengan jumlah hasil pendataan masyarakat. Melihat kebohongan kebohongan yang dilakukan oleh investor tersebut pada akhirnya masyarakat menyimpulkan bahwa muka penguasa tidak lebih baik dari toilet.

Dalam mural jelas terlihat narasi *"semen ngapusi"* (semen pembohong) yang ditulis oleh SeBumi dan warga di tiang posko pembebasan dengan warna merah dan vertikal. Narasi tersebut sebagai pembenaran tentang ketidakpercayaan masyarakat dengan PT Semen Indonesia dan kemudian masyarkat mengasosiasikan muka penguasa sebagai tempat untuk membuang kotoran atau sama halnya dengan toilet.

3. Keterlibatan Elit Politik dalam Konflik Pendirian PT Semen Indonesia di Rembang

Proses perizinan pendirian PT Semen Indonesia sudah berjalan sejak 2010. Bupati Rembang waktu itu M Salim yang menegeluarkan izin usaha pertambangan PT SI benomor 545/68/2010. Pada tahun 2012, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengeluarkan izin pembangunan PT Semen Indonesi dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bernomor 668.1/17 tahun 2012.

Izin tersebut telah menciderai peraturan yang ada yakni Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031 dan Peraturan Daerah Jawa Tengah No 6 tahun 2011 tentang Rencana Taat Ruang Jawa Tengah 2010-2030. Adanya peraturan tersebut tidak dihiraukan oleh para pemangku kebijakan. Bahkan putusa MA telah menyatakan kemenangan gugatan warga bersama WALHI seakan tak lagi berarti karena hingga hari pabrik sudah berdiri dan telah beroperasi. Dari paparan tersebut, masyarkat menyimpulkan bahwa dalam pendirian PT SI terdapat indikasi praktik KKN yang dilakukan oleh elit politik khusunya yang terlibat langsung dalam prosedur lolosnya AMDAL dan keluarnya izin PT Semen Indonesia.

Selain itu aparat negara dalam kasusu Rembang tidak dapat berperan sebagaimana mestinya. Aparat bertindak represif terhadap warga dan lebih melindungi PT Semen Indonesia serta koruptor yang bermain dibalik rencanana pendirian tersebut.

Keterlibaltan elit politik dan aparat dalam kasus Kendeng digambarkan menggunakan beberapa simbol -sesuatu yang mewakili ide atau gagasan- sebagai strategi pembenaran untuk menguatkan pengetahuan yang dingin disampaikan. Simbol yang digunakan diantaranya burung garuda yang mencengkeram sebuah tulisan birokrasi dalam kendali korporasi, ikon aparat, lambang semen gresik (PT Semen Indonesia), semen Holcim, alat berat, kepala babi, kepala serigala, tikus, bangunan pabrik hitam kelam dan pegunungan cerah.

4. Tidak Berfungsinya Instrumen Demokrasi : Partai Politik dan Pemilu

Pengetahuan tentang partai politik juga turut mewarnai konflik ini. Bagi masyarakat adanya partai politik dan pemilu tak berguna. Instrumen demokrasi yang diharapkan dapat menyuarakan suara masyarakat tolak pada akhirnya sama saja tak berfungsi. Dinamika politik yang terjadi di Rembang sendiri khusunya tak berdampak signifikan. Pergantian Bupati di Rembang tak membawa perubahan bagi masyarakat tolak karena suara masyarakat tentang penolakan sama sekali tak didengar. Pemangku kebijakan di Rembang seolah menutup mata dengan penolakan tersebut dan tak satupun yang dapat mendengar suara masyarakat tolak. Sejauh ini yang secara tegas menyampaikan penolkan terhadap pendirian PT Semen Indonesia ialah kepala desa Desa Timbrangan yang memang sejak pencalonan didukung oleh masyarkat tolak.

5. Keberadaan PT SI Beserta Pekerjanya Mengancam Petani

Kehadiran PT Semen Indonesia tentu akan berpotensi mengancam produktifitas petani karena simpanan air yang selama ini digunakan warga akan berkurang jika CAT Watuputih ditambang. Selain kebutuhan air, adanya kelelawaar penyerbuk di sekiatar goa di CAT Watuputih juga dapat mempercepat panen komoditas durian dan petai. Bukan tidak mungkin keduanya akan hilang jika PT Semen Indonesia berhasil menggerusak Pegunungan Kendeng Utara.

PT Semen Indonesia dan pekerjanya diberi labelling oleh masyarakat, sebuah definisi yang disematkan seseorang dan akan menjadi sebuah identitas bagaimana tipe orang tersebut. Lebelling pekerja pabrik semen dilabeli "hama" (sesuatu yang mengganggu produktifitas petani atau biang keladi kerusakan).

C. **Memahami Konsep Resistensi Masyarakat Penolak Pendirian PT Semen Indonesia**.

Jika diamati, ragam perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat penolak pendirian PT Semen Indonesia nyaris tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan. Beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat ialah menggunakan tembang, bunyi lesung, tradisi masyarakat lokal, mural dll. Keberagaman tersebut tidak bisa dilepaskan dari dua hal kesejarahan yang ada di Pegunungan Kendeng Utara.

Pertama, Pegunungan Kendeng Utara memiliki kedekatan dengan penyebaran islam di kota-kota pesisisr. Selain menjadi pusat perdagangan maritim, kawasan tersebut merupakan tempat bermukimnya para wali yang membawa ajaran Islam di Jawa. Islam mengajarkan hal baru tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alamnya, tanpa menggeser ajaran yang bersumber dari agama Hindu dan Budha yang telah ribuan tahun diyakini oleh orang Jawa.

Hingga hari ini kawasan tersebut meyakini ajaran Islam Jawa (sintesis ajaran islam yang datang dari luar oleh orang Jawa dan di-Jawa-kan, direngkuh (embrace) menjadi sesuatu yang baru milik Orang Jawa sendiri). Islam-Jawa mempraktekkan beragam ritual yang berhubungan dengan siklus kehidupan (sejak dari kandungan sampai liang kubur) yang disebut slametan. Substansi slametan adalah perayaan akan dua hal, pertama, perayaan akan rasa sukur karena diberi keselamatan oleh Yang Maha Kuasa, dan kedua adalah perayaan akan kehidupan bersama baik antara sesama manusia maupun antara manusia dengan alam. Ritual sedekah bumi merupakan satu contoh bentuk

slametan yang merayakan rasa terimakasih kepada alam yang telah memberikan kehidupan dan keselamatan bagi seluruh warga desa dan hampir dipraktikkan oleh masyarakat Jawa.

Tradisi kedua, berkaitan erat dengan sejarah sosial Gerakan Ratu Adil, atau bisa digolongkan sebagai gerakan mileniarial. Sejarah Jawa mencatat, lahirnya gerakan ratu adil tak lepas dari diterapkannya Sistim Tanam Paksa pada akhir abad 19 yang dianggap menyengsarakan para petani Jawa. Keresahan tersebut berbuah pemberontakan petani terhadap Pemerintah kolonial Belanda. Berdasarkan data arsip Nasional, pemberontakan petani di Jawa pada awal abad ke-20 terjadi pemberontakan hampir merata di Jawa, antara lain di Tanggerang, Pamanukan, Sukabumi, Ciasem, Kuningan (Jawa Barat), Pekalongan, Gombong, Semarang (Jawa Tengah). Mojokerto, Sidoarjo, Kediri dan Jember (Jawa Timur).Di wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Pegunungan Kendeng, salah satu perlawanan yang menonjol berpusat pada seorang tokoh karismatik yang bernama Samin Surosentiko pada awal abad ke-20. Samin Surosentiko melakukan corak perlawanan yang berbeda disbanding petani Jawa yang lain dengan tanpa kekerasan yakni menolak membayar pajak kepada Pemerintah kolonial Belanda. Gerakan Samin Surosentiko meluas di kalangan petani di kawasan Gunung Kendeng dan memberi dampak yang besar terhadap Pemerintah kolonial Belanda hingga perlu melakukan penindasan terhadap gerakan ini.

Tanpa memahami tradisi sejarah sosial lokal di Pegungan Kendeng Utara, sebagaimana telah diuraikan secara singkat diatas, akan sulit untuk memahami mengapa sebagian masyarakat Kendeng seolah-olah seperti melawan Pemerintah. Penolakan para petani Kendeng terhadap pendirian pabrik Semen yang tanpa menggunakan kekerasan harus dilihat tidak saja sebagai corak perlawanan terhadap menyempitnya ruang kehidupan mereka sebagai petani, namun juga rentetan sejarah yang membentuk sikap masyarakat.

D. Subjek dalam Mural

Pada aspek subjek yang diposisikan, berdasarkan hasil analisis keseluruhan mural perlawanan penoloakan pendirian pabrik semen di Rembang ditemukan siapa saja subjek yang diposisikan dalam mural. Subjek-subjek yang diposisikan dalam mural itu terdiri dari dua macam, yaitu subjek yang tampak *(visible)* dan subjek yang tidak tampak *(invisible).*

Subjek-subjek yang diposisikan dalam mural itu dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Petani

   Subjek yang diposisikan (baik yang tampak atau tidak tampak) adalah petani sebagai subjek yang berjuang mendapatkan haknya yakni mempertahankan tanah dan menjaga melestarikan pegunungan kendeng untuk kehidupan manusia. `

2. PT Semen Indonesia

   PT Semen Indonesia diposisikan sebagai subjek yang menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat dan menjadi musuh rakyat. Selain itu PT Semen Indonesia juga dianggap sebagai pembohong sekaligus pengrusak lingkungan dan pengrusak persaudaraan masyarakat. Masuknya PT Semen Indonesia menjadikan Rembang sebagai daerah yang hitam kelam.

3. Kapitalis, elit politik, koruptor

   Berdirinya pabrik semen PT Semen Indonesia bukan lah berdiri sendiri melainkan melibatkan berbagai elemen politik. Proses perizinan tentu melalui beberapa birokrasi diantaranya adalah pemerintah daerah yang mengeluarkan izin usaha penambangan dan pemerintah provinsi yang mengeluarkan izin pembangunan dan analisis mengenai dampak lingkungan. Elit politik dalam hal ini adalah birokrasi yang memiliki peran dalam meloloskan rencana pendirian pabrik semen di Rembang. Selain itu para elit tersebut dianggap sebagai musuh rakyat karena menimbulkan kesengsaraan, menciderai beragam produk hukum yang ada dan terdapat indikasi memakan uang rakyat atau tindak KKN. Musuh rakyat selanjutnya ialah para kapitalis atau pemilik modal beserta kroni-kroninya. Selain itu elit politik dalam mural kerap kali digambarkan sebaagai sosok srigala dan sosok babi ataupun tikus. Simbol tersebut menggambarkan bahwa elit politik tidak lain adalah sebagai manusia yang rakus dan licik.

4. Polisi-tentara

   Kehadiran polisi -tentara dalam kasus pendirian PT Semen Indonesia jelas terlihat bahwa ia sebagi subjek yang berada di garda terdepan melindungi PT Semen

Indonesia dan para koruptor. Selain itu polisi-tentara bagian dari aktor yang melakukan tidakan represif terhadap masyarakat tolak sehingga ia menjadi salah satu dari sekian banyak musuh rakyat.

5. Ganjar Pranowo

Nama Ganjar Pranowo menjadi satu-satunya elit politik yang namanya tampak jelas dalam mural yang diproduksi oleh Sebumi bersama masyarakat. Mural tersebut diproduksi pada tahun 2014 sehingga sejak awal kasus ini Ganjar Pranowo telah ditetapkan warga sebagia musuh rakyat.

6. Partai politik

Partai politik dalam kasus ini diposisikan sebagai elemen yang harus dilawan masyarakat karena digunakan sebagai alat kuasa bagi pengusaha untuk melancarkan proses investasi. Selain itu partai digunakan kendaran elit politik dalam kontestasi pemilu.

7. Masyarakat tolak

Gerakan masyarakat tolak tidak lain adalah untuk meneruskan perjuangan Soekarno bahwa untuk mencapai kesejahteraan sosial revolusi tetap harus dilakukan dan sebagai penerus RA Kartini untuk membabaskan masyarakat. Perempuan yang berjuang menolak pendirian pabrik semen di Rembang disebut sebagai Kartini Baru.

8. Masyarakat pro

Masyarakat pro pada mural ini diposisiskan sebagai seorang pecundang karena hanya berdiam diri melihat kerusakan kerusakan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia.

9. Pekerja PT Semen Indonesia

Subjek lain yang diposisikan dalam kasus ini ialah pekerja PT Semen Indonesia yang mendaapat gelar dari masyaraakat tolak sebagai hama bagi petani karena menjadi biang keladi kerusakan dan mengganggu produktivitas petani.

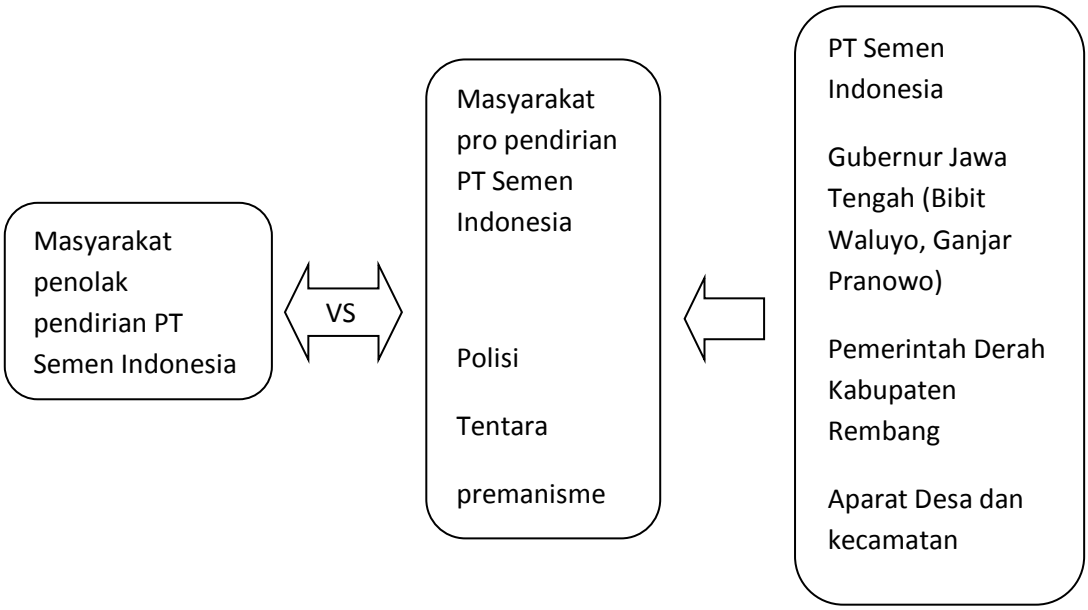
10. RA Kartini dan Soekarno

Hadirnya sosok Kartini dan Soekarno dalam mural diposisikan sebagai subjek yang hari ini telah lahir Kartini baru dan Soekarno baru guna meneruskan perjuangnnya.

11. Seniman

Seniman diposisiskan sebagai seseorang yang harus membela rakyat tertindas, menhhidupkan budaya yang dimiliki oleh rakyat bukan kebudayaan yang dimanipulasi oleh pemerintah.

E. Kuasa yang Bekerja di dalam Kompleksitas konflik.



(Gambar relasi kuasa dalam konflik pendirian PT Semen Indonesia)

Gambar diatas secara jelas menjelaskan bahwa dalam koflik pendirian PT Semen Indonesia di Rembang, masyarakat penolak berhadapan dengan masyarakat pro yang ditopang oleh aparat dan premanisme. Guna memuluskan rencana pendirian pabrik, PT Semen Semen Indonesia bersama Gubernur Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Rembang, aparat desa dan kecamatan saling bahu membahu melakukan

pembenaran atas keabsahan berdirinya PT Semen Indonesia. Selain itu elit politik dan elit perusahaan tidak terlibat langsung dalam konflik melainkan melalui masyarakat pro, aparat ataupun premanisme yang terjadi serta regulasi yang dibuatnya.

Dalam konflik pendirian PT Semen Indonesia di Rembang, seringkali dilihat secara permukaan bahwa terdapat kategorisasi dalam masyarakat yakni masyarakat yang menolak dan masyarakat yang menerima berdirinya PT Semen Indonesia di Rembang. Sebuah harapan jika pabrik semen didirikan di Rembang yakni dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, membuka lapangan kerja serta kesejahteraan. Hal tersebut diyakini oleh masyarakat yang menerima hadirnya PT Semen Indonesia. Disisi lain, masyarakat yang menolak berdirinya pabrik meyakini bahwa adanya penambangan akan merusak ruang hidup manusia. CAT Watuputih sebagai tempat bersandar hidup masyarakat telah menjadi tumpuan atas keberlangsungan hidup manusia dengan segala kekayaan yang tersimpan. Sehingga mempertahankan ruang hidup sama halnya dengan mewarisi dan menjaga generasi manusia selanjutnya.

Lebih jauh, dalam gerakan penolaka tersebut terdapat banyak pihak yang menyiratkan adanya relasi kuas di dalam wacaana penolakan. Wacana besar yang digaungkan ialah penolakan pendirian PT Semen Indonesia demi kelestarian lingkungan. Pendefinisian dan transformasi wacana tersebut tentu sangat berfariatif. "*Tujuan gerakan tersebut ialah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kelestarian alam melaui jamaah-jamaah tahlil dan pertemuan lainnya*".[31]

Pada mulanya isu penolakan semen ini telah direspon oleh sebagian masyarakat, melalui beberapa tahap diantarnya penyadaran terhadap masyarakat tentang arti penting kelestarian alam hingga berwujud dalam aksi penolakan. Seiring berkembangnya isu, dukungan dari berbagai kalangan juga turut mewarnai gerakan tolak, diantaranya adalah keterlibatan tokoh masyarakat di Rembang. Hadirnya dukungan dari K.H. Zaim Ahmad Ma'sum, KH Ahmad Mustofa Bisri, Yahya cholil Staquf serta tokoh masyarakat lainnya semakin memperkuat basis gerakan. Hal tersebut karena tipikal masyarakat Remang hormat dengan tokoh-tokoh masyarakat tersebut dan percaya dengan apa yang disampaikan.

Kemudian, hadirnya para tokoh tersebut memberikan sebuah sistem pengetahuan terhadap gerakan tolak yakni pentingnya kelstarian alam berdasarkan perspektif islam

[31]Zamroni , Wawancara, 12 Juli 2017.

melalui cara-cara seperti pertemuan-pertemuan, istighosah, tahlil serta cara-cara yang sudah ada di masyarakat lainnya. "*Selain kelestarian alam, kalangan santri ingin mempertahankan kultur yang berbasis pesantren di Rembang. Hadirnya PT Semen Indonesia akan memberikan perubahan sosial masyarakat*".[32]

Seiring berjalannya waktu dinamika konflik semakin kompleks. Kompleksitas konflik tersebut menuntut masyarakat untuk menjlin kerjasama dengan pihak luar Rembang baik akademisi, aktivis lingkungan serta siapapun yang memiliki semangat untuk pelestarian alam. Dari sisinilah beragam pihak mulai masuk diantaranya alangan samin dari Sukolilo, LBH, Walhi, Akademisi dan para mahasiswa dan salah satunya adalah SeBumi.

Ubaidillah Achmad salah seorang tokoh yang mendampingi masyarakat menjelaskan bahwa banyaknya pihak yang terlibat dalam kasus tersebut tentu berpengaruh pada pola gerakan yang dilakukan. Ia mengakui adanya ragam gerakan yang itu melalui proses dialog saling melengkapi antara masyarakat tolak dengan elemen-elemen lain yang turut terlibat dalam perjuangan penolakan. *"Saya hanya akan datang jika kegiatan tersebut seperti istighosah atau pengajian akbar"*[33] disisi lain ia juga menyayangkan beberapa gerakan yang justru menyakiti warga itu sendiri seperti cor kaki yang beberapa kali dilakukan oleh masyarakat.

Selain itu, konstalasi politik di tingkat daerah hingga nasional juga mewarnai kompleksitas konflik yang terjadi. Proses perizinan telah berjalan sejak tahun 2010 dengan dikeluarkannya Izin Usaha Penambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Rembang M Salim. Tahun 2012 Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo memberikan izin lingkungan atas kegiatan penambangan dan pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang. Kedua izin tersebut bertentangan dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah dan perda Kabupaten Rembang yang menyatakan bahwa kawasan CAT Watu putih sebagai daerah resapan air dan kawasan lindung geologi. Namun pada kenyataannya Perda tersebut tidak dihiraukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Pada tahun 2013 Jawa Tegah memiliki Gubernur baru yang salah satu misinya adalah Jateng Ijo Royo-royo. Misi tersebut menjadi angin segar masyarakat. Namun sering berjalannya waktu, Ganjar Pranowo justru semakin memperkeruh konflik. Mulanya ia menyarankan masyarakat untuk menempuh jalur hukum dan pemerintah akan menerima apaun keputusan yang

[32]Wawancara Ubaidillah Ahmad. 9 September 2017.
[33]Wawancara Ubaidillah Achmad. 9 September 2017.

dihasilkan. Atas saran tersebut masyarakat menggugat PT Semen Indonesia ke PTUN Semarang. Berdasarkan keputusan PTUN, gugatan masyarakat dianggap kadaluarsa karena lebih dari 90 hari dari izin yang dikeluarkan. Setelah ditolak oleh PTUN, masyarakat mengajukan peninjaukan kembali di tataran Mahkamah Agung yang pada akhinya gugatan tersebut dimenangkan oleh masyarakat atas PT Semen Indonesia. Beberapa hari setelahnya, Ganjar mengeluarkan izin baru untuk PT Semen Indonesia karena izin lama yang diberikan ke PT Semen Indonesia pada 2012 telah dibatalkan oleh MA. Selian itu, Joko Widodo mengintruksikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis. KLHS merekomendasikan CAT Watuputih tidak boleh ditambang. Namun lagi-lagi keputusan tersebut tidak dilaksanakan dan Joko Widodo cenderung membiarkan banyaknya pelaggaran yang dilakukan Gubernur atau Bupati.

Kemudian hadirnya SeBumi yang bertujuan untuk membantu perjuangan masyarakat melalui seni juga turut mewarnai pola gerakan. Hadirnya mural ditengah masyarakat menjadi suatu hal yang baru. "*Yang lebih faham dengan gambar-gambar tersebut ya yang membuat gambar, saya tahunya ya gambar-gambar gunung atau hal-hal yang sering saya lihat*".[34] Berdasarkan penjelasan Joko Prianto, tidak semua gambar yang ada dalam mural dapat difahami oleh masyarakat. Hal ini tentu menjadi kejanggalan tersendiri karena maksud awal SeBumi adalah untuk membantu masyarakat namun pada kenyataannya justru masyarakat tidak memahami atas apa yang dibuat oleh SeBumi dalam hal ini mural. Berdasarkan analisis peneliti, terdapat beberapa simbol yang memang hanya akan difahami oleh kalangan dari SeBumi itu sendiri. Hal tersebut menunjukaan bahwa hadirnya SeBumi juga turut mendominasi masyarakat melalui simbol-simbol yang dibuatnya.

F. Gerakan Lingkungan di Indonesia

Pada tahun 1980an lingkungan hidup menjadi agenda politik dunia dengan melahirkan paradigma baru tentang pembangunan yang sekarang disebut sebagi pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development).* Istilah tersebut muncul pertama kali dalam *World Conservation Strategy* dari *the International Union for the Conservation of Natur (1980)* yang kemudian dipakai oleh *Lester R. Brown* dalam buku *Building a Sustainable Society (1981).* Istilah tersebut kemudian menjadi populer melalui laporan *World Commission on*

[34]Joko Prianto, Wawancara, 29 September 2017.

Environment and Development: "Masa Depan Kita Bersama" (1987). Selanjutnya pada tahun 1992 paradigma pembangunan berkelanjutan diadopsi sebagai agenda politik pembangunan seluruh negara dunia dalam konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janerio (1992) dan menjadi titik tolak orientasi ekologis ditempatkan dalam pembangunan.[35]Memasuki akhir abad ke 20 menjadi titk tolak pergerakan lingkungan atas reaksi terhadap peradaban industrial yang telah mengakibatkan krisis lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan sebenarnya ingin mengintegrasikan beberapa aspek utama pembangunan diantaranya adalah aspek ekonomi, aspek budaya dan aspek lingkungan. Ketiga unsur tersebut tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu samaa lain. Sehingga dalih pembenaran bahwa kemajuan ekonomi harus mengorbankan lingkungan tidak benar adanya. Karena pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga aspek tersebut secara holistik. Namun pemahaman ini seringkali bias dan terjebak dalam orientasi pembangunan yang menegedepankan pertumbuhan ekonomi[36]sehingga alam lingkungan semata dipandang sebagai objek yang siap dieksploitasi atas nama kesejahteraan manusia yang berimplikasi pada ketidakadilan lingkungan.

Memasuki akhir abad ke 20 menjadi titik tolak pergerakan lingkungan atas reaksi terhadap peradaban industrial yang telah mengakibatkan krisis lingkungan. Gerakan tersebut dilandasi atas pendekatan *ecosophy* pertama kali diperkenalkan Filsuf Norwegia bernama Arne Naess. Titik tolak pendekatan ini didasarkan atas filosofi penyelamatan bumi dengan mengawinkan dimensi ekologi dan dimensi spritual.[37] Arne Naess meyakini bahwa krisis lingkungan dapat diselesaikan dengan merubah cara pandang (*worldview*) dan perilaku manusia secara fundamental dan radikal terhadap alam semesta. Dalam melaksanakan pendekatan tersebut, sebuah pola hidup baru tentu dibutuhkan, tak hanya berkaitan dengan

---

[35] Daru purnomo. "Ekofilosofi Deep Ecology Menggugat Paradigma Pembangunan*". Jurnal Research Informasi System,* Volume 5, (Juni, 2014). hal. 1-10.

[36] Eko Nurmardiansyah. "Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal MELINTAS*, Volume 30 (Januari, 2014), hal 70-104.

[37]Endra Satmaidi, "Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan", *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi*,Volume 14 (Agustus 2015), hal 32-45.

perorangan namun juga melibatkan budaya masyarakat keseluruhan. Hal ini berarti bahwa etika lingkungan hidup baru diperlukan manusia untuk berinteraksi dengan alam semesta.[38]

Pandangan Naess dikenal dengan istilah *Deep Ecology*, salah satu teori ekosentrisme sebagai lanjutan dari teori biosentrisme yang menentang cara pandang antroposentrisme atau yang dikenal dengan *shallow ecological movement*, paradigma yang dituduh sebagai biang kerok kerusakan alam dibalik kegarangan teknologi modern dan sains. Garis besar *shallow ecological movement* menekankan kehadiran manusia atas lingkungan, memandang manusia sebagai pusat alam semesta, sedangkan alam dan isinya digunakan sebagai alat pemuas untuk mencapai keinginan manusia. Bahwa manusia mengutamakan hak atas alam dengan norma ekonomis namun tidak menekankan tanggungjawab manusi, hanya melihat jangka pendek dan memimpikan pertumbuhan ekonomi. Asumsi dasar dari *Shallow ecological movement* ialah krisis lingkungan hanyalah persoalan teknis yang tidak ada kaitannya dengan faktor kesadaran manusia, sosial dan sisitem ekonomi.[39] Singkatnya *Shallow ecology* menekankan pada pemenuhan atas kepentingan manusia dalam pengelolaan alam tanpa memperdulikan daya dukung alam tersebut.

Dasar filsafat *Deep Ecology* ialah *Ecosophy*. Secara gramatikal *eco* memiliki arti 'rumah tangga' sedangkan *sophy* berarti kearifan. Berdasarkan terminologi tersebut *ecosophy* merupakan sebuah bentuk kearifan mengatur hidup yang selaras dengan alam sebagai rumah tangga secara luas. Pada mulanya *Ecosophy* merupakan sebuah ilmu, kini *Ecosophy*bergeser menjadi sebuah kearifan, cara dan pola hidup yang selaras dengan alam dimana seluruh penghuni alam semesta harus menjaga kearifan rumah tangga tersebut. Setiap individu manusia memiliki kesadaran mendalam tentang rasa menyatu dengan alam atau kesadaran ekologi. Gerakan ini dikenal dengan gerakan filsafat lingkungan hidup.[40] Gerakan *Deep Ecology* sebagai gerakan internasional bermula dari Rachel Carson yang mengajak manusia melakukan perubahan mendasar dalam semua hal guna menyelamatkan lingkungan hidup yang tertuang dalam bukunya *Silent Spring*.[41]

---

[38]Eko Nurmardiansyah, "Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal MELINTAS*, Volume 30 (Januari, 2014), hal 70-104.

[39] Arif Wibowo. Deep Ecology. https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2009/08/12/deep-ecology/ (diakses pada 17 Maret 2018 pukul 16.00WIB)

[40]Sutoyo. "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup," *ADIL : Jurnal Hukum*, Volume 5 (2013), hal 193-206.

[41] Dadang Aji Nurdiansyah."Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia",*Jurnal MELINTAS*, Volume 30, (2014), hal. 70-104.

Deep ekology berusaha untuk memeberikan jalan keluar atas kebuntuan kerusakan alam dengan mengubah cara pandang bahwa seluruh entitas yang ada di alam terintegrasi menjadi satu kesatuan dan memiliki nilai dan kedudukan yang sama. Manusia bukanlah subjek yang superior, namun makhluk yang juga harus tunduk pada hukum dan cara kerja jagat semesta.[42] Konsekuensi cara pandang tersebut bahwa manusia memiliki kewajiban dan tanggungjawab moral untuk hormat pada seluruh realita ekologis bukan hanya karena telah memberi kehidupan tapi karena sama sama memiliki hak untuk ada, hidup dan berkembang di alam semesta. Dua hal mendasar yang ada pada *deep ecology* ialah pertama, bahwa manusia dan kepentingannya bukan lagi didewakan, karena teori ini terpusat pada seluruh spesies serta memikirkan kepentingan jangka panjang untuk seluruh entitas lingkungan. Kedua, dirancang sebagai etika praktis yang sejalan dengan relasi etis alam semesta dan diterjemahkan dalam aksi nyata yakni perubahan paradigma, nilai dan gaya hidup yang komprehensif.[43]Teori ini mendudukkan permasalahan lingkungan secara komprehensif dengan suatu perspektif relasional secara holistik.

Jika manusia diletakkan sebagaia bagian integral dari alam maka setiap jengkal perilakunya akan berdampak signifikan dan memiliki konsekuensi logis yang berkaitan dan diarasakan oleh manusia.[44]

Di Iindonesia, perlawanan untuk mendapatka keadilan lingkungan harud melewati perjalana panjang. Kasus mayarakat Batak menghadapi industri Plup and Paper di Tapanuli menjadi salah satu cerminan. Bahwa masyarakat batak harus melakukan perlawanan dari tahun 1986-2012. Gerkan tersebut menghasilkan beberapa kebijakan baru pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan Indoraya dan mendorong karakter perusahaan tersebut untuk memiliki tanggungjwab sosial terhadap masyarakat sekitar. Kedua hal tersebut tidak mungkin terwujud jika tidak ada perlawanan masyarakat.

Sebagaimana kasus di Rembang, pendirian PT Semen Indonesia di Rembang berkaitan erat dengan persoalan kebijakan. Tidak akan berdiri pabrik jika Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang memeberikan izin usaha dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memebrikan izin penmbangan dan AMDAL. Pemerintah bahkan cenderung menutup mata

---

[42]Dadang Aji Permana. Etika Ekologi Panenteisme Islam.
[43]Husni Thamrin. "Rekonstruksi Ecoreligius Orang Melayu Solusi Penyelamatan Lingkungan," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 1, (Januari – Juni, 2017). Hal. 99 –136.
[44]Yudha Adi Pradana. Melek Ekologi Melalui Lembaga Pendidikan Dan Kebijakan Pemerintah. http://bbplm_jakarta.kemendesa.go.id/index.php/view/detil/206/deep-ecology-melek-ekologi-melalui-lembaga-pendidikan-dan-kebijakan-pemerintah. (Diakses pada 19 Maret 2018 pukul 23.00 WIB).

dengan kasus ini yang telah menodai beragam aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Hal ini terlihat bahwa persoalan lingkungan termasuk persoalan politik karena membicarakan kekuasan *(power)* dan kewenangan *(authority)* yang bertemu dalam sebuah kebijakan *(policy).*[45]

Dalam kasus Rembang, kesadaran dan cara pandang masyarakat tolak tentang alam yang dituangkan dalam gerakan menuai kebuntuan. Keadilan lingkungan yang diperjuangkan masyarakat dijawab oleh pemerintah dengan sikap arogan dengan pernyataan kebijakan yang lebih memihak pada kepentingan korporasi dan hanya menggunakan logika investasi tanpa melihat kondisi masyarakat yang berada disekitar tambang. Baik pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi yang terlibat langsung dalam membuat kebijakan pendirian PT Semen Indonesia harus memahami bahwa persoalan lingkungan tak lagi bisa dipandang sebelah mata karena dapat membahayakan biosfer dan kehidupan manusia.

Di Indonesia perhatian terhadap pembangunan dan lingkungan hidup telah dituangkan secara tersirat dalam UUD 1945 yang kemudian diterjemahkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa :

> *Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.*[46]

Sayangnya hal tersebut seringkali diabaikan oleh pemangku kebijakan misalnya dalam kausu pendirian PT Semen Indonesia. Pegunungan Kendeng Utara sebagai tempat bersandar hidup manusia bersikukuh untuk ditambang tanpa mendengar masyarakat, ancaman krisis pangan dan lingkungan yang sudah di depan mata.

---

[45] Dadang Aji Nurmardiansyah. "Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal MELINTAS*, Volume 30, (2014), hal. 70-104.

[46]Suryo Adiwibowo, et.al. (2017). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan Pemanfaatan dan PengelolaanPegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih &Sekitarnya, Kabupaten Rembang Tahap 1*. (Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Penutup

Konflik pendirian pabrik di Rembang dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan antar elit pemerintah dan elit perusahaan dengan masyarakat setempat. Adanya PT Semen Indonesia tentu akan berimplikasi pada perubahan sosial ekonomi politik masyarakat serta perubahan lingkungan. Pemerintah dan perusahaan hanya fokus pada rasionalitas ekonomi dan otoritas kebijakan yang acapkali abai terhadap kebudayaan masyarakat dan dampak jangka panjang berupa kerusakan lingkungan. Masyarakat penolak pendrian PT Semen Indonesia meyakini hadirnya pabrik semen menganncam keberlangsungan hidup manusia dan kelestarian alam.

Dalam gerakannya, masyarakat tolak mematerialkan pengetahuan tentang penolakan pendirian pabrik semen di Rembang melalui strategi berwacana dengan memanfaatkan berbagai media salah satunya mural. Terdapat beberapa pengetahuan yang diproduksi masyarakat pada mural:

Pertama, terdapat pengetahuan modern yang diproduksi oleh masyarakat yaitu CAT Watuputih sebagai bagian dari Pegunungan Kendeng Utara merupakan kawasan lindung geologi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang tahun 2011-2031 dan sebagai kawasan imbuhan air berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2010-2030.

Kedua, terdapat kearifan lokal yang hidup di masyarakat yaitu konstruksi sosial pegunungan kapur yang membujur dan mencakup sebagian dari Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan dan Blora (Jawa Tengah), serta di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan (Provinsi Jawa Timur) dinamai warga sebagai Pegunungan Kendeng Utara. Metafora seekor naga yang sedang tidur disematkan masyarakat untuk Pegunungan Kendeng Utara, bahwa pegunungan tersebut memiliki sistem kehidupan sebagaimana makhluk hidup lainnya.

Pemaknaan atas metafora tersebut dituangkan masyarakat dalam sebuah lagu yang berjudul Ibu Bumi.

Selain itu, pilihan untuk bertani merupakan jati diri bagi masyarakat. Sosio kultural masyarakat menyebut bahwa alam tidak untuk dieksploitasi dan sawah merupakan proses kebudayaan serta hasil warisan sejarah. Bagi masyarakat, kemandirian dan kekayaan batin yang dianut dari leluhur adalah manifestasi atas kesejahteraan. Kemudian, pada hakikatnya manusia dengan alam memiliki hubungan filosofis "Tanah hilang, kami punah", sehingga mencerabut masyarakat dari ruang hidup sama halnya meniadakan keberadaannya.

Dalam catatan sejarah abad ke 14, kawasan sekitar Pegunungan Kendeg Utara merupaakan tempat penyebaran Islam-Jawa (milik orang Jawa) oleh para wali. Pada abad ke 19, ada gerakan ratu adil di Pegunungan Kendeg Utara yang melakukan perlawanan tanpa kekerasan dan menolak pembayaran pajak oleh pemerintah kolonial. Salah seorang tokoh ratu adil tersebut ialah Samin Surosentiko.

Ketiga, perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat penolak pendirian PT Semen Indonesia tidak lain adalah untuk mempertahankan ruang hidup manusia, demi anak cucu. Sumber daya alam yang ada di Pegunungan Kendeng Utara merupakan tempat bersandar hidup manusia di sekitarnya.

Keempat, masyarakat penolak pendirian PT Semen Indonesia bagian dari penerus apa yang diimpikan oleh RA Kartini dan Soekarno. RA Kartini berjuang melawan feodalisme melalui tulisan dan masyarakat tolak memperjuangkan ruang hidup manusia yang keduanya bermura pada membebaskan manusia. Soekarno menginginkan adanya revolusi nasional dan revolusi sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Penolakan pendirian PT Semen Indonesia mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan hidup manusi tidak lain untuk kesejahteraan.

Kelima, Rembang merupakan daerah agraris, bukan kawasan industri. Dua per tiga jenis rumah tangga yang ada di Rembang ialah pertanian. Sehingga Pegunungan Kendeng Utara sebagai kawasan penyumbang air terbesar memiliki peran vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat Rembang.

Dalam perjuangnnya, masyarakat juga memproduksi pengetahuan tentang PT Semen Indonesia itu sendiri diantaranya, pertama hadirnya PT Semen Indonesia memicu terjadinya polarisasi masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan labelling yang ada di masyarakat tentang

“masyarakat pro” dan “masyarakat kontra”. Lebeling tersebut mempengaruhi hubungan sosial yang ada di masyarakat.

Kedua, bagi masyarakat, PT Semen Indonesia adalah pembohong. Hal tersebut terlihat dengan tidak terbukanya informasi mengenai rencana pendirian pabrik. Selain itu narasi kesejahteraan yang digaungkan tidak sesuai dengan profil sosiologis masyarakat sekitar.

Ketiga, elit politik terlibat dalam konflik pendirian PT Semen Indonesia. Tahun 2010, Bupati Rembang M Salim yang menegeluarkan izin usaha pertambangan PT SI benomor 545/68/2010. Kemudian, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menegeluarkan izin pembangunan PT Semen Indonesia dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bernomor 668.1/17 tahun 2012. Selain itu, aparat bertindak represif terhadap warga dan lebih melindungi PT Semen Indonesia serta koruptor yang bermain dibalik rencanana pendirian tersebut.

Keempat, dalam konflik tersebut instrumen demokrasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Partai politik dan pemilu yang diharapkan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat pada kenyataannya hanya mendramatisasi konflik yang ada. Konstelasi politik di tataran daerah, provinsi hingga nasional menuai kebuntuan dalam menjawab konflik yang terjadi.

Kelima, keberadaan PT Semen Indonesia dan pekerjanya mengancam produktifitas petani. Simpanan air, kelelawar penyerbuk, dll yang mempercepat panen petani akan hilang jika Pegnungan Kendeng Utara di tambang.

Terdapat beberapa subjek dalam mural yang mewarnai kompleksitas konflik baik yang terlihat atau tak terlihat. Subjek tersebut diantaranya petani, PT Semen Indonesia, kapitalis, elit politik, koruptor, polisi-tentara, Ganjar Pranowo, partai politik, masyarakat penolak, masyarakat pro, pekerja PT Semen Indonesia, RA Kartini dan Soekarno, seniman/aktivis. Posisi subjek tersebut ditentukan atas sikap, kesadaran, pekerjaan serta kepentingan.

Pada penelitian ini, terdapat relasi kuasa yang bekerja dalam kompleksitas konflik. Kuasa-kuasa tersebut terlihat dengan menguatnya gerakan penolakan pendirian PT Semen Indonesia. Kehadiran tokoh masyarakat, aktivis lingkungan, akademisi, LBH, Walhi, Jurnalis, mahasiswa memberikan penguatan wacana, pengetahuan dan pembenaran atas

ketidakhadiran PT Semen Indonesia di Rembang. Mustahil gerakan penolakan akan berlangsung jika tanpa ada kuasa yang bekerja dalam menopang wacana penolakan. Pun sebaliknya, gerakan penolakan tidak akan ada jika pengetahuan tentang kelestarian alam da PT Semen Indonesia tidak diproduksi masyarakat. Wacana tidak menjadi benar tanpa adanya pengetahuan dan kuasa didalamnya.

Dalam konflik tersebut, masyarakat tolak berhadapan dengan masyarakat pro yang ditopang oleh aparat dan premanisme. Guna melancarkan rencana pendirian pabrik, PT Semen Semen Indonesia bersama Gubernur Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Rembang, aparat desa dan kecamatan saling bahu membahu melakukan pembenaran atas keabsahan berdirinya PT Semen Indonesia dengan wacana-wacana yang lain, sehingga terjadi pergulatan wacana antara masyarakat penolak pendirian PT Semen Indonesia dengan masyarakat pro serta seluruh elem yang terlibat. Elit politik dan elit perusahaan tidak terlibat langsung dalam konflik melainkan melalui masyarakat pro, aparat ataupun premanisme yang terjadi serta regulasi yang dibuatnya.

Konflik pendirian PT Semen Indonesia di Rembang, seringkali dilihat secara permukaan, bahwa terdapat kategorisasi dalam masyarakat yakni masyarakat yang menolak dan masyarakat yang menerima berdirinya PT Semen Indonesia di Rembang. Pada permukaan, gerakan masyarakat penolak pendirian PT Semen Indonesia tampak seragam. Namun tak dipungkiri dalam gerakan penolakan tersebut terdapat elemen-elemen yang terlibat berjalan sebagaimana misinya masing-masing dengan dibalut kewacanaan penolakan. Wacana besar yang digaungkan ialah penolakan pendirian PT Semen Indonesia demi kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, mural yang diproduksi oleh SeBumi hanya menggambarkan sebagian kecil konflik. Hadirnya SeBumi juga memberikan dominasi terhadap masyarakat melalui simbol-simbol serta narasi yang dituangkan dalam mural. Hal ini jelas terlihat ketika peneliti menyakan ke masyarakat mengenai makna-makna yang ada dalam narasi. Namun masyarakat mengaku tidak mengetahui makna keseluruhan atas mural yang dibuat SeBumi. Di sisi lain hadirnya SeBumi memberikan corak perlawanan baru bagi masyarakat untuk menguatan strategi wacana penolakan.

Gerakan penolakan pendirian PT Semen Indonesia di Rembang berhasil mendesak serangkaian kebijakan penting yang diambil oleh pemerintah. Gerakan perlawanan pendirian PT Semen Indonesia di rembang telah mendorong lahirnya Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan. Keputusan tersebut merekomendasikan, menerapkan prinsip kehati-hatian (*pre-cautionary principle*) dan prinsip pencegahan (*prevention principle*) pada pemanfaatan dan pengeloaan Pegunungan Kendeng Utara khususnya kawasan yang menjadi sengketa dan banyaknya sumber daya alam. Selain itu KLHS juga merekomendasikan adanya perbaikan kebijakan, rencana, dan program yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Tata Ruang Kabupaten yang terkait dengan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan Pegunungan Kendeng yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut dibuat atas permintaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo.

Kemudian, masyarakat memenangkan gugatan di MA. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016, telah menyatakan kemenangan para Penggugat/Pembanding/Pemohon PK yaitu Joko Prianto,Dkk dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), yang salah satu amar putusannya: MEMBATALKAN objek sengketa berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah setelah melalui jalur litigasi yang panjang.

Serangkaian keputusan tersebut mustahil karena niat baik pemerintah. Gerakan sosial masyarakatlah yang mendorong berubahan kebijakan itu terjadi melalui pembenaran dan wacana-wacana yang diproduksi.

Berkaca dari konflik Rembang, persoalan lingkungan merupakan persoalan politik karena membicarakan kekuasan *(power)* dan kewenangan *(authority)* yang bertemu dalam sebuah kebijakan *(policy).* Guna mewujudkan keadilan lingkungan, maka seluruh elemen masyarakat harus memiliki etik atas lingkungan hidup. *Deep ekology* berusaha untuk memeberikan jalan keluar atas kebuntuan kerusakan alam dengan mengubah cara pandang bahwa seluruh entitas yang ada di alam terintegrasi menjadi satu kesatuan dan memiliki nilai dan kedudukan yang sama.

Daftar Pustaka

Adiwibowo, Suryo, et.al. (2017). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan Pemanfaatan dan PengelolaanPegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih &Sekitarnya, Kabupaten Rembang Tahap 1*. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Arifin, Kamil Alfi. (2011). Keistimewaan Yogyakarta Dan Politik Wacana: Analisis Wacana Visual Media Di Ruang Publik. Skripsi sarjana, Fakultas FPSB UII, Yogyakarta.

Dreyfus, Hubert L. and Paul Rabinow. (1982). *Beyond Structuralism and Hermeneutic*. Chicago: University Of Chicago Press.

Dwicipta dan Hendra Try Ardianto. (2015). #RembangMelawan. Yogyakarta: Literasipress.

Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*.Yogyakarta: Lkis.

Falah, A.B. Rodhial dan Cahyo Rahmadi.Telaah semen rembang antara ramah lingkungan dan kenyataan. http://www.mongabay.co.id/2015/04/27/telaah-semen-rembang-antara-ramah-lingkungan-dan-kenyataan-sebenarnya/, (akses 3 April 2017)

Haryatmoko. (2017).*Critical Discourse Analysis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Joko prianto. Wawancara. 29 September 2017.

K. Bertens. (1985).*Filsafat Barat Abad Xx, Jilid Ii (Prancis)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nurmardiansyah, Dadang Aji.“Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia”,*Jurnal MELINTAS*, Volume 30, (2014), hal. 70-104.

Permana,Dadang Aji.“Etika Ekologi Panenteisme Islam”. *Bunga Rampai* Volume 1, (2016), hal. 85-113.

Pradana, Yudha Adi. “Melek Ekologi Melalui Lembaga Pendidikan Dan Kebijakan Pemerintah,”.http://bbplm_jakarta.kemendesa.go.id/index.php/view/detil/206/deep-ecology-melek-ekologi-melalui-lembaga-pendidikan-dan-kebijakan-pemerintah. Diakses pada 19 Maret 2018 pukul 23.00 WIB.

Purnomo, Daru.“Ekofilosofi Deep Ecology: Menggugat Paradigma Pembangunan”.*Jurnal Ilmiah pendidikan* ,Volume 10 No 3, (2013). Hal. 1-15.

Rechard , West And Turner Lynn H. (2014). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Praktik*. Jakarta: Salemba humanika.

Rose, Gillian. (1985). *Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials*. London: SAGE Publication.

Santoso, Listiyono dkk. (2014). *Epistinologi Kiri*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Satmaidi, Endra.“Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan”. *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*Vol. 24, No. 2, (2015), hal. 34-42.

Sutoyo. “Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup”.*Adil : Jurnal Hukum* Vol. 4, (2013), hal. 193-206.

Thamrin, Husni. “Rekonstruksi Ecoreligius Orang Melayu Solusi Penyelamatan Lingkungan”. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16,(2017), hal. 99 –136.

Titscher, Stefan dkk. (2009). *Metode Analisis Teks dan Wacana.* Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Ubaidillah achmad. Wawancara. 9 September 2017 .

Kamahi, Umar. Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitobah*, Volume 3, (Juni 2017), hal. 117-133.

Taufik, Umar dan M Arif Afandi. Resistensi Gerakan Mahasiswa terhadap Kapitalisme Pendidikan. *Jurnal Paradigma*, Volume 2, (2014). Hal 1-13.

Heraini, Nanda. Makna Nilai Resistensi Dalam Kebudayaan Hip Hop (Analisis Studi Resepsi Anggota Kelompok Tari Hip Hop Monkiez Terhadap Konsep Resistensi). (Tesis Magister, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2012). Hal. 39.

Kebung, Konrad. Membaca Kuasa Michel Foucault dalam Konteks Kekuasaan di Indonesia. *Jurnal Melintas* Volume 33 (2017), hal. 34-51.

Widyawati, Nina. (2016). Etnisitas dan *Agama Sebagai Isu Politik Kampanye JK-WIRANTO Pada Pemilu 2009.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yvonna , Lincoln S. dan K Dezin Norman. (2011). *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publication.

Zamroni. Wawancara. 12 Juni 2017.

Identitas Penulis

1. Identitas penulis pertama :
   a. Nama Lengkap dan Gelar Akademik : Sarah Rahma Agustin
   b. Nomor Induk Mahasiswa : 14321196
   c. Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 24 Agustus 1996
   d. Program Studi/Fakultas/Universitas : Ilmu Komunikasi/ FPSB/ Universitas Islam Indonesia
   e. Bidang Minat Studi : Jurnalisme dan Penyiaran
   f. Alamat dan Nomor Kontak/ Email :.

2. Identitas penulis kedua :
   a. Nama Lengkap dan Gelar Akademik : Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA
   b. NIK/NIDN : 0516087901
   c. Jabatan Akademik : Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.
   d. Alamat dan Nomor Kontak : Yogyakarta. 08xxxxxxxx